



IPB University
— Bogor Indonesia —

Inspiring Innovation with Integrity
in Agriculture, Ocean and Biosciences for a Sustainable World

LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

Untuk yang berakhir pada 31 Desember 2024

PTNBH - INSTITUT PERTANIAN BOGOR

KEMENDIKBUD RISTEK

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2024

(Audited)

DITJEN DIKTIRISTEK

PTNBH – INSTITUT PERTANIAN BOGOR(677546)



BOGOR

2024

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

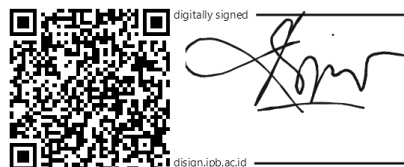
Institut Pertanian Bogor merupakan salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Institut Pertanian Bogor ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Institut Pertanian Bogor. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Bogor, Mei 2025

An. Rektor
Wakil Rektor Bidang Resilensi Sumberdaya dan
Infrastruktur



Dr. Alim Setiawan Slamet, S.TP, M.Si
NIP. 198202272009121001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Pernyataan Tanggung Jawab	iv
Ringkasan	v
I. Laporan Realisasi Anggaran	1
II. Neraca	2
III. Laporan Operasional	3
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	4
V. Catatan atas Laporan Keuangan	5
A. Penjelasan Umum	5
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	12
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	17
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	19
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	22
Lampiran dan Daftar	24

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Laporan Realisasi Anggaran	1
Tabel 2.	Neraca	2
Tabel 3.	Laporan Operasional	3
Tabel 4.	Laporan Perubahan Ekuitas	4
Tabel 5.	Kualitas Piutang	8
Tabel 6.	Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap	9
Tabel 7.	Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud	10
Tabel 8.	Rincian DIPA IPB	12
Tabel 9.	Rincian Estimasi & Realisasi Pendapatan	12
Tabel 10.	Perbandingan Realisasi Pendapatan	13
Tabel 11.	Perbandingan Pagu Anggaran & Realisasi Belanja	13
Tabel 12.	Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai	14
Tabel 13.	Perbandingan Realisasi Belanja Barang	15
Tabel 14.	Perbandingan Realisasi Belanja Modal	16
Tabel 15.	Neraca	17
Tabel 16.	Laporan Operasional	19
Tabel 17.	Rincian Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	20
Tabel 18.	Rincian Beban Pegawai	20
Tabel 19.	Rincian Kegiatan Non Operasional	21
Tabel 20.	Laporan Perubahan Ekuitas	22



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Kampus IPB Dramaga, Bogor 16680

Telepon (0251) 8622642

Facsimile (0251) 8622708

ask@apps.ipb.ac.id | ipb.ac.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Institut Pertanian Bogor (IPB) yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bogor, Mei 2025

Wakil Rektor

Bidang Resilensi Sumberdaya dan Infrastruktur



Dr. Alim Setiawan Slamet, S.TP, M.Si

NIP. 198202272009121001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Satker 677546 (PTNBH-IPB) Tahun Anggaran 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan Negara dan Belanja Negara selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024.

Realisasi Pendapatan Negara pada 31 Desember 2024 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp.71.441.151 atau mencapai 0 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp.0.

Realisasi Belanja Negara pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.294.853.368.239 atau mencapai 101,98 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp.294.859.170.000.

NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.

Nilai Aset per 31 Desember 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp.0 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp.0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp.0; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp.0. Nilai Kewajiban dan Ekuitas dicatat dan disajikan sebesar Rp.0 yang terdiri atas Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp.0, Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp.0. dan Ekuitas sebesar Rp.0.

Nilai Aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp.0 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp. 0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp.0; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp.0. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp. 0.

LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.14.481.872, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp.294.853.368.239 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp.294.838.886.367. Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp.56.959.279 dan sebesar Rp.0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp.294.781.927.088.

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tanggal pelaporan dibandingkan dengan tanggal pelaporan tahun sebelumnya. Ekuitas awal pada tanggal 1 Januari 2024 dan 1 Januari 2023 adalah sebesar Rp. 0. Defisit-LO tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.294.781.927.088, sedangkan untuk tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.267.918.558.853. Koreksi yang menambah/mengurangi Ekuitas untuk tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp.0 sedangkan untuk tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.0. Transaksi Antar Entitas untuk tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar

Rp.294.781.927.088, sedangkan untuk tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp.267.918.558.853. Sehingga Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah senilai Rp.0 dan untuk Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah senilai Rp.0.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

DITJEN DIKTI (PTN-BH INSTITUT PERTANIAN BOGOR)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 Tabel 1.

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31-Des-2024		% thd Angg	31-Des-2023
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN	B.1				
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	-	71.441.151	0,00	135.954.018
JUMLAH PENDAPATAN		-	71.441.151	0,00	135.954.018
BELANJA	B.2	-	-	0,00	-
Belanja Pegawai	B.2.1	294.859.170.000	294.853.368.239	99,99	268.054.512.871
Belanja Barang	B.2.2	-	-	0,00	-
Belanja Modal	B.2.3	-	-	0,00	-
Belanja Bantuan Sosial	B.2.4	-	-	0,00	-
JUMLAH BELANJA		294.859.170.000	294.853.368.239	99,99	268.054.512.871

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

DITJEN DIKTI
(PTN-BH INSTITUT PERTANIAN BOGOR)

NERACA
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023
Tabel 2.

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31-Des-2024	31-Des-2023
ASET	C.1		
ASET LANCAR	C.1.1		
Piutang Bukan Pajak	C.1.1.1	-	-
Uang Muka Belanja (prepayment)	C.1.1.2	-	-
JUMLAH ASET LANCAR		-	-
ASET TETAP	C.1.2		
JUMLAH ASET TETAP		-	-
ASET LAINNYA	C.1.3		
JUMLAH ASET LAINNYA		-	-
JUMLAH ASET		-	-
KEWAJIBAN	C.2		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	C.2.1		
Utang Kepada Pihak Ketiga	C.2.1.1	-	-
Pendapatan Diterima di Muka	C.2.1.2	-	-
JUMLAH KEWAJIBAN		-	-
EKUITAS	C.3		
Ekuitas	C.3.1	-	-
JUMLAH EKUITAS		-	-
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		-	-

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

**DITJEN DIKTI
(PTN-BH INSTITUT PERTANIAN BOGOR)**

**LAPORAN OPERASIONAL
Untuk Periode yang Berakhir
31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023
Tabel 3.**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31-Des-2024	31-Des-2023
KEGIATAN OPERASIONAL	D		
PENDAPATAN	D.1		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1.1	14.481.872	14.946.072
JUMLAH PENDAPATAN		14.481.872	14.946.072
BEBAN	D.2		
Beban Pegawai	D.2.1	294.853.368.239	268.054.512.871
Beban Persediaan	D.2.2	-	-
Beban Barang Jasa	D.2.3	-	-
Beban Pemeliharaan	D.2.4	-	-
Beban Perjalanan Dinas	D.2.5	-	-
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada	D.2.6	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.2.7	-	-
JUMLAH BEBAN		294.853.368.239	268.054.512.871
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(294.838.886.367)	(268.039.566.799)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.3	-	-
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.3.1	-	-
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	D.3.2	-	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.3.3	56.959.279	121.007.946
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		56.959.279	121.007.946
POS LUAR BIASA	D.4		
Beban Luar Biasa	D.4.1	-	-
SURPLUS/DEFISIT – LO		(294.781.927.088)	(267.918.558.853)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

DITJEN DIKTI
(PTN-BH INSTITUT PERTANIAN BOGOR)

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Periode yang Berakhir
31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023
Tabel 4.

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31-Des-2024	31-Des-2023
EKUITAS AWAL	E.1	-	-
SUPLUS/DEFISIT LO	E.2	(294.781.927.088)	(267.918.558.853)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	-	-
	E.4	-	-
Dampak Kumulatif Perubahan	E.4.1	-	-
Koreksi Lain-lain	E.4.2	-	-
JUMLAH		-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	294.781.927.088	267.918.558.853
EKUITAS AKHIR		0	0

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis IPB

*Dasar Hukum Entitas
dan Rencana
Strategis*

IPB sebagai perguruan tinggi negeri yang didirikan oleh pemerintah yang berstatus sebagai badan hukum publik yang otonom memiliki kewajiban untuk menjalankan mandat Tridharma, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. PTN badan hukum adalah *flagship* perguruan tinggi di tanah air dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi yang berkualitas. Oleh karena itu IPB sebagai PTN badan hukum dituntut untuk menyelenggarakan mandat tridharma yang bermutu tinggi, menyediakan akses pendidikan bermutu tinggi dan terjangkau bagi masyarakat, menyelenggarakan tata kelola PTN yang andal dan akuntabel, serta menjadi perguruan tinggi kelas dunia. Kegiatan dan layanan tersebut terefleksikan di dalam visi dan misi IPB dan program-program yang diturunkan dalam visi dan misi tersebut IPB mempunyai visi:

“Menjadi perguruan tinggi inovatif dan resilien untuk kemajuan bangsa yang berkelanjutan dalam membangun *techno-socio entrepreneurial university* yang unggul di tingkat global pada bidang pertanian, kelautan, dan biosains tropika.”

Dengan misi:

1. Menyiapkan insan terdidik yang unggul, profesional dan berkarakter kewirausahaan di bidang pertanian, kelautan dan biosains tropika.
2. Memelopori pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang unggul di bidang pertanian, kelautan dan biosains tropika untuk kemajuan bangsa.
3. Mentransformasikan ilmu pengetahuan, teknologi, serta seni dan budaya unggul IPB untuk pencerahan, kemaslahatan, dan peningkatan kualitas kehidupan secara berkelanjutan.

IPB sebagai salah satu entitas dalam Kementerian Negara/Lembaga terus meningkatkan akuntabilitas dalam hal laporan keuangan. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor 2005/BALAP.007/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal dan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

*Pendekatan
Penyusunan Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester II Tahun 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Institut Pertanian Bogor. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Basis Akuntansi

A.3 Basis Akuntansi

Institut Pertanian Bogor menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa tersebut terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan IPB dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah, transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester II Tahun 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konsekuensi-konsekuensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Direktorat Akuntansi yang merupakan entitas pelaporan dari IPB. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan IPB adalah sebagai berikut:

Pendapatan- LRA

(1) Pendapatan-LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat

- jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan LO

(2) Pendapatan-LO

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Direktorat Keuangan adalah sebagai berikut:

- Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
- Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode sewa.
- Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN),
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa,
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca,
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan Ganti Rugi, apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan

- Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- b. Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal,
 - c. Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Tabel 5.
Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.

- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan
 - a. harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - b. harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - c. harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);

- c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya, kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tata Cara Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 6.
Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya,
- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- ATB disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil, sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2021 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 7.

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Software	4 tahun
Franchise	5 tahun
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10 tahun
Hak Ekonomi, Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20 tahun
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70 tahun

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

Kewajiban Pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Penjelasan atas Pos
Laporan Realisasi
Anggaran

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI
ANGGARAN

IPB memperoleh alokasi anggaran awal untuk tahun 2024 berupa belanja pegawai sebesar Rp.294.859.170.000. Selama pelaksanaan Tahun Anggaran 2024 realisasi anggaran sebesar Rp. Rp.294.853.368.239, belum perlu dilakukan penyesuaian anggaran melalui revisi DIPA. Pelaksanaan anggaran ini dilakukan alokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat perencanaan anggaran. Anggaran awal dan anggaran setelah revisi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 8.
Rincian DIPA IPB
Tahun Anggaran 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2024	
	Realisasi TA 31 Desember 2024	Anggaran TA 2024
Pendapatan		
Pendapatan PNB	-	-
Jumlah Pendapatan	-	-
Belanja		
Belanja Pegawai	294.853.368.239	294.859.170.000
Belanja Barang	-	-
Belanja Modal	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-
Jumlah Belanja	294.853.368.239	294.859.170.000

Realisasi Pendapatan
Rp.71.441.151

B.1 Pendapatan
B.1.1 Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.71.441.151 atau mencapai 0,00% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp.0. Pendapatan IPB adalah berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya yang berasal dari akun 425911-Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 9.
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2024		
	Anggaran	Realisasi	%
Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	-	71.441.151	0,00
Pendapatan Pendidikan	-	-	0,00
Pendapatan Lain-Lain	-	-	0,00
Jumlah	-	71.441.151	0,00

Tabel 10.
Perbandingan Realisasi Pendapatan
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi per Desember 2024	Realisasi per Desember 2023	%
Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	71.441.151	135.954.018	(47,45)
Pendapatan Jasa Lainnya	-	-	0,00
Pendapatan Denda	-	-	0,00
Pendapatan Lain-lain	-	-	0,00
Jumlah	71.441.151	135.954.018	(47,45)

B.2 Belanja

Realisasi Belanja
Rp.294.853.368.239

Realisasi Belanja IPB sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.294.853.368.239 atau 99,99% dari anggaran belanja sebesar Rp.294.859.170.000. Rincian pagu anggaran dan realisasi belanja sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 11.
Perbandingan Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja
Sampai Dengan
31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	(%)	Realisasi 31 Desember 2023	(%)
Belanja Pegawai	294.853.368.239	99,99	268.054.512.871	98,30
Belanja Barang	-	-	-	-
Belanja Modal	-	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
Jumlah	294.853.368.239	99,99	268.054.512.871	98,30

Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar 3,68% dibandingkan dengan periode yang berakhir 31 Desember 2023. Hal ini disebabkan adanya kenaikan gaji pokok PNS sebesar 8% serta adanya belanja gaji dan tunjangan PPPK yang tidak ada pada tahun-tahun sebelumnya sehingga menyebabkan kenaikan pada belanja pegawai.

B.2.1 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai
Rp.294.853.368.239

Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil

(PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.294.853.368.239 dan Rp.268.054.512.871. Realisasi belanja TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 3,68% dari TA 2023. Hal ini disebabkan adanya kenaikan gaji pokok PNS sebesar 8% serta adanya belanja gaji dan tunjangan PPPK yang tidak ada pada tahun-tahun sebelumnya sehingga menyebabkan kenaikan pada belanja pegawai.

Tabel 12.
Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023
(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	+/- (%)
Belanja Gaji Pokok PNS	128.490.283.880	121.452.593.700	0,058
Belanja Pembulatan Gaji PNS	424.654	1.124.999	(0,623)
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	10.068.204.384	9.554.168.190	0,054
Belanja Tunj. Anak PNS	2.288.676.169	2.285.715.942	0,001
Belanja Tunj. Struktural	0	0	0
Belanja Tunj. Fungsional	16.069.708.000	16.080.134.692	(0,001)
Belanja Tunj. PPh PNS	2.157.750.858	931.324.734	1,317
Belanja Tunj. Beras PNS	5.754.782.880	6.076.979.460	(0,053)
Belanja Uang Makan PNS	15.073.979.000	16.275.352.000	(0,074)
Belanja Tunj. Umum PNS	2.114.475.000	2.219.224.754	(0,047)
Belanja Tunj. Profesi Dosen	63.700.711.000	59.832.976.400	0,065
Belanja Tunj. Kehormatan Profesor	48.357.585.600	33.344.918.000	0,450
Belanja Tunjangan Tenaga Pendidik Non PNS	267.784.800	0	100
Belanja Gaji Pokok PPPK	359.536.300	0	100
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	2.222	0	100
Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	25.029.450	0	100
Belanja Tunjangan Anak PPPK	6.265.142	0	100
Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	38.255.000	0	100
Belanja Tunjangan Beras PPPK	21.363.900	0	100
Belanja Uang Makan PPPK	58.550.000	0	100
Jumlah Belanja	294.853.368.239	268.054.512.871	0,090

Belanja Barang Rp.0

B.2.2 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0 yang disebabkan pada Tahun Anggaran 2024 dan 2023 IPB tidak memiliki pagu Belanja Barang.

Tabel 13.
Perbandingan Realisasi Belanja Barang
Tahun 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	%
Belanja Barang Operasional	-	-	0,00
Belanja Barang Non Operasional	-	-	0,00
Belanja Persediaan	-	-	0,00
Belanja Jasa	-	-	0,00
Belanja Pemeliharaan	-	-	0,00
Belanja Perjalanan Dinas	-	-	0,00
Belanja Barang Utk diserahkan ke Masyarakat	-	-	0,00
Jumlah Belanja Kotor	-	-	0,00
Pengembalian Belanja Barang	-	-	0,00
Jumlah Belanja	-	-	0,00

Belanja Modal Rp.0

B.2.3 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal untuk Periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Pada Tahun Anggaran 2024 dan 2023 IPB tidak memiliki pagu Belanja modal sehingga realisasinya adalah Rp.0.

Tabel 14.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tahun 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	%
Belanja Modal Tanah	-	-	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	0,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	0,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	0,00
Belanja Modal Lainnya	-	-	0,00
Jumlah Belanja Kotor	-	-	0,00
Pengembalian Belanja Modal	-	-	0,00
Jumlah Belanja Modal	-	-	0,00

Belanja Bantuan Sosial
Rp.0

B.2.4 Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Realisasi Belanja Bantuan Sosial sampai dengan 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Hal ini disebabkan karena IPB tidak memiliki pagu Belanja Bantuan Sosial.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Penjelasan atas
Pos Neraca

Tabel 15.
NERACA
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

(dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31-Des-2024	31-Des-2023
ASET	C.1		
ASET LANCAR	C.1.1		
Piutang Bukan Pajak	C.1.1.1	-	-
Uang Muka Belanja (<i>prepayment</i>)	C.1.1.2	-	-
JUMLAH ASET LANCAR		-	-
ASET TETAP	C.1.2		
JUMLAH ASET TETAP		-	-
ASET LAINNYA	C.1.3		
JUMLAH ASET LAINNYA		-	-
JUMLAH ASET		-	-
KEWAJIBAN	C.2		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	C.2.1		
Utang Kepada Pihak Ketiga	C.2.1.1	-	-
Pendapatan Diterima di Muka	C.2.1.2	-	-
JUMLAH KEWAJIBAN		-	-
EKUITAS	C.3		
Ekuitas	C.3.1	-	-
JUMLAH EKUITAS		-	-
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		-	-

C.1. Aset

Aset Lancar Rp.0

C.1.1. Aset Lancar

Jumlah Aset Lancar Institut Pertanian Bogor per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.0.

C.1.1.1 Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan
Pajak
Rp.0

Piutang Bukan Pajak satker IPB sampai dengan 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0,-.

C.1.1.2 Uang Muka Belanja (*Prepayment*)

Uang Muka Belanja
(*Prepayment*)
Rp.0

Jumlah Uang Muka Belanja (*Prepayment*) satker Institut Pertanian Bogor per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.0.

C.1.2. Aset Tetap

Aset Tetap
Rp.0

Jumlah Aset Tetap Institut Pertanian Bogor per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.0.

Aset Lainnya
Rp.0

C.1.3. Aset Lainnya

Jumlah Aset Lainnya Institut Pertanian Bogor per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.0.

Kewajiban Jangka
Pendek
Rp.0

C.2. Kewajiban

C.2.1. Kewajiban Jangka Pendek

C.2.1.1. Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Pendapatan
Diterima di Muka
Rp.0

C.2.1.2. Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Ekuitas
Rp.0

C.3. EKUITAS

C.3.1. Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Penjelasan atas
Pos Laporan
Operasional

LAPORAN OPERASIONAL Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 Tabel 16.

URAIAN	CATATAN	31-Des-2024	31-Des-2023
KEGIATAN OPERASIONAL	D		
PENDAPATAN	D.1		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1.1	14.481.872	14.946.072
JUMLAH PENDAPATAN		14.481.872	14.946.072
BEBAN	D.2		
Beban Pegawai	D.2.1	294.853.368.239	268.054.512.871
Beban Persediaan	D.2.2	-	-
Beban Barang Jasa	D.2.3	-	-
Beban Pemeliharaan	D.2.4	-	-
Beban Perjalanan Dinas	D.2.5	-	-
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada	D.2.6	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.2.7	-	-
JUMLAH BEBAN		294.853.368.239	268.054.512.871
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(294.838.886.367)	(268.039.566.799)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.3	-	-
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.3.1	-	-
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	D.3.2	-	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.3.3	56.959.279	121.007.946
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		56.959.279	121.007.946
POS LUAR BIASA	D.4		
Beban Luar Biasa	D.4.1	-	-
SURPLUS/DEFISIT – LO		(294.781.927.088)	(267.918.558.853)

D. KEGIATAN OPERASIONAL

D.1. PENDAPATAN

D.1.1 Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendapatan akrual berasal dari penjualan, pengelolaan BMN dan Iuran Badan Usaha, pendapatan pendidikan dan pendapatan lain-lain yang merupakan pengembalian atas belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal yang berasal dari transaksi tahun-tahun sebelumnya. Jumlah Pendapatan sampai dengan periode 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.14.481.872 dan Rp.14.946.072. Rincian Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak terdiri dari :

Penerimaan Negara
Bukan Pajak
Rp.14.481.872

Tabel 17.
Rincian Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak
31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Keterangan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Pendapatan Sewa, Tanah, Gedung dan Bangunan	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	14.481.872	14.946.072
Jumlah	14.481.872	14.946.072

Beban Pegawai
Rp.294.853.368.239

D.2. BEBAN

D.2.1. Beban Pegawai

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Jumlah Beban Pegawai Tahun Anggaran 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.294.853.368.239 dan Rp.268.054.512.871.

Tabel 18.
Rincian Beban Pegawai
31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Keterangan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Beban Pegawai	294.853.368.239	268.054.512.871
Beban Honorarium dan Vakasi	-	-
Beban Lembur	-	-
Jumlah	294.853.368.239	268.054.512.871

Beban Persediaan
Rp.0

D.2.2. Beban Persediaan

Beban Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Beban Barang Jasa
Rp.0

D.2.3. Beban Barang Jasa

Beban Barang Jasa per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Beban Pemeliharaan
Rp.0

D.2.4. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Beban Perjalanan Dinas
Rp.0

D.2.5. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Beban Barang Untuk
Diserahkan Kepada
Rp.0

D.2.6. Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada

Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Beban Bantuan
Sosial
Rp.0

D.2.7. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Kegiatan non
Operasional
Rp.56.959.279

D.3. KEGIATAN NON OPERASIONAL

Jumlah Kegiatan Non Operasional Tahun Anggaran 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.56.959.279 dan Rp.121.007.946, yang terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas.

Pendapatan
Pelepasan Aset Non
Lancar
Rp.0

D.3.1 Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Pendapatan
Penyelesaian
Kewajiban Jangka
Panjang
Rp.0

D.3.2 Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang

Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Pendapatan dari
Kegiatan Non
Operasional Lainnya
Rp.56.959.279

D.3.3 Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp.56.959.279 dan Rp.121.007.946.

Tabel 19.
Rincian Kegiatan Non Operasional
Tahun 2023 dan 2022

Keterangan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	-	-
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	56.959.279	121.007.946
Jumlah	56.959.279	121.007.946

Pos Luar Biasa
Rp.0

D.4. POS LUAR BIASA

D.4.1 Beban Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Tidak terdapat pendapatan atau beban dari Pos Luar Biasa pada Tahun Anggaran 2024 dan 2023.

E.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Penjelasan atas
Pos Laporan
Perubahan Ekuitas

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Tabel 20.

URAIAN	CATATAN	30-Des-2024	30-Des-2023
EKUITAS AWAL	E.1	-	-
SUPPLUS/DEFISIT LO	E.2	(294.781.927.088)	(267.918.558.853)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	-	-
	E.4	-	-
Dampak Kumulatif Perubahan	E.4.1	-	-
Koreksi Lain-lain	E.4.2	-	-
JUMLAH		-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	294.781.927.088	267.918.558.853
EKUITAS AKHIR	E.6	0	0

*Ekuitas Awal
Rp.0.*

E.1. Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas Awal pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0.

*Defisit LO
Rp.294.781.927.088*

E.2. Surplus/Defisit-LO

Jumlah Defisit LO pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah Defisit sebesar Rp.(294.781.927.088) dan Rp.(267.918.558.853). Surplus (Defisit) LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

*Koreksi yang
Menambah/
Mengurangi
Rp.0*

E.3. Koreksi yang Manambah/Mengurangi

Nilai Koreksi yang menambah/mengurangi pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Ekuitas Rp.0

E.4. Ekuitas

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0.

*Transaksi Antar
Entitas
Rp.294.781.927.088*

E.5. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp.294.781.927.088 dan Rp.267.918.558.853. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal K/L, antar K/L, antar BUN, maupun K/L dengan BUN.

Ekuitas Akhir
Rp.0

E.6. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp0.

Laporan Keuangan Ditjen Diktiristek (PTN BH – Institut Pertanian Bogor)
Tahun Anggaran 2024

Laporan-laporan Pendukung

Hasil Rekonsiliasi SAKTI-SPAN s/d Periode 2024-12
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Per 31 Desember 2024 (*Audited*)
Neraca per 31 Desember 2024 (*Audited*)
Laporan Operasional (LO) Per 31 Desember 2024 (*Audited*)
Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Per 31 Desember 2024 (*Audited*)
Laporan Realisasi Pendapatan Per Akun Per 31 Desember 2024 (*Audited*)
Laporan Realisasi Belanja Per Akun Per 31 Desember 2024 (*Audited*)
Neraca Percobaan (Basis Akrua) Per 31 Desember 2024 (*Audited*)
Neraca Percobaan (Basis Kas) Per 31 Desember 2024 (*Audited*)
Telaah LK Tahun Anggaran 2024



**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 677546
SAMPAI DENGAN PERIODE 2024-12**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	289,109,170,000	289,109,170,000	0
2	Belanja	294,854,521,338	294,854,521,338	0
3	Pengembalian Belanja	-1,153,099	-1,153,099	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	71,441,151	71,441,151	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 17-JAN-25



**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI 023
ESELON I : DITJEN PENDIDIKAN TINGGI, RISET DAN TEKNOLOGI 17
SATUAN KERJA : DITJEN DIKTIRISTEK (PTN BH - INSTITUT PERTANIAN BOGOR) 677546

Tgl Data : 07/05/25 2:19 AM
Tgl Cetak : 07/05/25 10:08 AM
Halaman : 1
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	71,441,151	71,441,151	0	0	135,954,018	135,954,018	0
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	71,441,151	71,441,151	0	0	135,954,018	135,954,018	0
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	0	71,441,151	71,441,151	0	0	135,954,018	135,954,018	0
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	294,859,170,000	294,853,368,239	(5,801,761)	100.00	272,691,459,000	268,054,512,871	(4,636,946,129)	98.3
1. Belanja Pegawai	294,859,170,000	294,853,368,239	(5,801,761)	100.00	272,691,459,000	268,054,512,871	(4,636,946,129)	98.3
2. Belanja Barang	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Belanja Modal	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI 023
ESELON I : DITJEN PENDIDIKAN TINGGI, RISET DAN TEKNOLOGI 17
SATUAN KERJA : DITJEN DIKTIRISTEK (PTN BH - INSTITUT PERTANIAN BOGOR) 677546

Tgl Data : 07/05/25 2:19 AM
Tgl Cetak : 07/05/25 10:08 AM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	294,859,170,000	294,853,368,239	(5,801,761)	100.00	272,691,459,000	268,054,512,871	(4,636,946,129)	98.3
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

Bogor, 7 Mei 2025
Penanggung Jawab UAKPA
Rektor

Arif Satria
NIP 197109171997021003

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (023) KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIT ORGANISASI : (17) DITJEN PENDIDIKAN TINGGI, RISET DAN TEKNOLOGI

WILAYAH/PROVINSI : (0200) JAWA BARAT

SATUAN KERJA : (677546) DITJEN DIKTIRISTEK (PTN BH - INSTITUT PERTANIAN BOGOR)

Tgl Data : 07/05/25 2:19 AM

Tgl Cetak : 07/05/25 10:08 AM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2024	2023	Jumlah	%
1	2	3	4	5

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	0	0	0	
------------------------------	---	---	---	--

Keterangan :

FINAL

Bogor, 7 Mei 2025

Penanggung Jawab UAKPA

Rektor

Arif Satria

NIP 197109171997021003

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (023) KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
ESELON I : (17) DITJEN PENDIDIKAN TINGGI, RISET DAN TEKNOLOGI
WILAYAH/PROVINSI : (0200) JAWA BARAT
SATUAN KERJA : (677546) DITJEN DIKTIRISTEK (PTN BH - INSTITUT PERTANIAN BOGOR)

Tgl Data : 07/05/25 2:19 AM
Tgl Cetak : 07/05/25 10:08 AM
Halaman : 1
lap_lo_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	14,481,872	14,946,072	(464,200)	(3.106)
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	14,481,872	14,946,072	(464,200)	(3.106)
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	14,481,872	14,946,072	(464,200)	(3.106)
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	294,853,368,239	268,054,512,871	26,798,855,368	9.998
Beban Persediaan	0	0	0	
Beban Barang dan Jasa	0	0	0	
Beban Pemeliharaan	0	0	0	
Beban Perjalanan Dinas	0	0	0	
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (023) KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
ESELON I : (17) DITJEN PENDIDIKAN TINGGI, RISET DAN TEKNOLOGI
WILAYAH/PROVINSI : (0200) JAWA BARAT
SATUAN KERJA : (677546) DITJEN DIKTIRISTEK (PTN BH - INSTITUT PERTANIAN BOGOR)

Tgl Data : 07/05/25 2:19 AM
Tgl Cetak : 07/05/25 10:08 AM
Halaman : 2
lap_lo_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	0	0	0	
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	294,853,368,239	268,054,512,871	26,798,855,368	9.998
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(294,838,886,367)	(268,039,566,799)	(26,799,319,568)	9.998
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	0	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	56,959,279	121,007,946	(64,048,667)	(52.929)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	56,959,279	121,007,946	(64,048,667)	(52.929)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	56,959,279	121,007,946	(64,048,667)	(52.929)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(294,781,927,088)	(267,918,558,853)	(26,863,368,235)	10.027
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(294,781,927,088)	(267,918,558,853)	(26,863,368,235)	10.027

Keterangan :

FINAL

Bogor, 7 Mei 2025
Penanggung Jawab UAKPA
Rektor

Arif Satria
NIP 197109171997021003

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (023) KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT ORGANISASI : (17) DITJEN PENDIDIKAN TINGGI, RISET DAN TEKNOLOGI
WILAYAH/PROVINSI : (0200) JAWA BARAT
SATUAN KERJA : (677546) DITJEN DIKTIRISTEK (PTN BH - INSTITUT PERTANIAN BOGOR)
Tgl Data : 07/05/25 7:37 AM
Tgl Cetak : 07/05/25 10:08 AM
Halaman : 1
lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(294,781,927,088)	(267,918,558,853)	(26,863,368,235)	10.03
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	294,781,927,088	267,918,558,853	26,863,368,235	10.03
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	0	0	0	0
EKUITAS AKHIR	0	0	0	0

Keterangan :
FINAL
Bogor, 7 Mei 2025
Penanggung Jawab UAKPA
Rektor

Arif Satria
NIP 197109171997021003

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 023 **KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**
ESELON I : 17 **DITJEN PENDIDIKAN TINGGI, RISET DAN TEKNOLOGI**
WILAYAH/PROVINSI : 0200 **JAWA BARAT**
SATUAN KERJA : 677546 **DITJEN DIKTIRISTEK (PTN BH - INSTITUT PERTANIAN BOGOR)**

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 07/05/25 10:09 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pen_akun_satker

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan					
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	14,481,872	0	14,481,872	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	0	14,481,872	0	14,481,872	
4259	Pendapatan Lain-Lain					
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	56,959,279	0	56,959,279	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	0	56,959,279	0	56,959,279	
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	0	71,441,151	0	71,441,151	
	JUMLAH PENDAPATAN	0	71,441,151	0	71,441,151	

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 023
ESELON I : 17
WILAYAH/PROVINSI : 0200
SATUAN KERJA : 677546
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
DITJEN PENDIDIKAN TINGGI, RISET DAN TEKNOLOGI
JAWA BARAT
DITJEN DIKTIRISTEK (PTN BH - INSTITUT PERTANIAN BOGOR)

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 07/05/25 10:09 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 7/5/25 4:31 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PECAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	124,693,466,000	128,494,820,000	128,490,283,880	0	128,490,283,880	100	4,536,120
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1,520,000	1,578,000	1,577,753	1,153,099	424,654	26.91	1,153,346
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	10,000,000,000	10,068,205,000	10,068,204,384	0	10,068,204,384	100	616
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	2,390,000,000	2,288,677,000	2,288,676,169	0	2,288,676,169	100	831
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	6,000,000	0	0	0	0		0
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	14,600,000,000	16,069,708,000	16,069,708,000	0	16,069,708,000	100	0
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	920,000,000	2,157,751,000	2,157,750,858	0	2,157,750,858	100	142
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	6,000,000,000	5,754,783,000	5,754,782,880	0	5,754,782,880	100	120
511129	Belanja Uang Makan PNS	19,000,000,000	15,073,979,000	15,073,979,000	0	15,073,979,000	100	0
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	2,440,000,000	2,114,475,000	2,114,475,000	0	2,114,475,000	100	0
511153	Belanja Tunjangan Profesi Dosen	65,608,608,000	63,700,751,000	63,700,711,000	0	63,700,711,000	100	40,000
511154	Belanja Tunjangan Kehormatan Profesor	36,653,760,000	48,357,653,000	48,357,585,600	0	48,357,585,600	100	67,400
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	282,313,354,000	294,082,380,000	294,077,734,524	1,153,099	294,076,581,425	100	5,798,575
5115	Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS							
511521	Belanja Tunjangan Tenaga Pendidik Non PNS	426,816,000	267,785,000	267,784,800	0	267,784,800	100	200
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5115	426,816,000	267,785,000	267,784,800	0	267,784,800	100	200
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK							
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	0	359,537,000	359,536,300	0	359,536,300	100	700
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	0	3,000	2,222	0	2,222	74.07	778
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	0	25,030,000	25,029,450	0	25,029,450	100	550
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	0	6,266,000	6,265,142	0	6,265,142	99.99	858
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	0	38,255,000	38,255,000	0	38,255,000	100	0
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	0	21,364,000	21,363,900	0	21,363,900	100	100
511628	Belanja Uang Makan PPPK	0	58,550,000	58,550,000	0	58,550,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5116	0	509,005,000	509,002,014	0	509,002,014	100	2,986
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	282,740,170,000	294,859,170,000	294,854,521,338	1,153,099	294,853,368,239	100	5,801,761
	JUMLAH BELANJA	282,740,170,000	294,859,170,000	294,854,521,338	1,153,099	294,853,368,239	100	5,801,761

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (023) KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIT ORGANISASI : (17) DITJEN PENDIDIKAN TINGGI, RISET DAN TEKNOLOGI

WILAYAH/PROVINSI : (0200) JAWA BARAT

SATUAN KERJA : (677546) DITJEN DIKTIRISTEK (PTN BH - INSTITUT PERTANIAN BOGOR)

Tgl Data : 07/05/25 2:19 AM

Tgl Cetak : 07/05/25 10:08 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	294,853,368,239
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	71,441,151	0
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	14,481,872
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	56,959,279
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	128,490,283,880	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	424,654	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	10,068,204,384	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	2,288,676,169	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	16,069,708,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	2,157,750,858	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	5,754,782,880	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	15,073,979,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	2,114,475,000	0
3.0	511153	Beban Tunjangan Profesi Dosen	63,700,711,000	0
3.0	511154	Beban Tunjangan Kehormatan Profesor	48,357,585,600	0
3.0	511521	Beban Tunjangan Tenaga Pendidik Non PNS	267,784,800	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	359,536,300	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	2,222	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	25,029,450	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	6,265,142	0
3.0	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	38,255,000	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	21,363,900	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	58,550,000	0
JUMLAH			294,924,809,390	294,924,809,390

Keterangan :

FINAL

Bogor, 7 Mei 2025

Penanggung Jawab UAKPA

Rektor

Arif Satria

NIP 197109171997021003

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (023) KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIT ORGANISASI : (17) DITJEN PENDIDIKAN TINGGI, RISET DAN TEKNOLOGI

WILAYAH/PROVINSI : (0200) JAWA BARAT

SATUAN KERJA : (677546) DITJEN DIKTIRISTEK (PTN BH - INSTITUT PERTANIAN BOGOR)

Tgl Data : 07/05/25 7:37 AM

Tgl Cetak : 07/05/25 10:09 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	294,853,368,239
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	71,441,151	0
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	14,481,872
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	56,959,279
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	128,490,283,880	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1,577,753	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	10,068,204,384	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	2,288,676,169	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	16,069,708,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	2,157,750,858	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	5,754,782,880	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	15,073,979,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	2,114,475,000	0
3.0	511153	Belanja Tunjangan Profesi Dosen	63,700,711,000	0
3.0	511154	Belanja Tunjangan Kehormatan Profesor	48,357,585,600	0
3.0	511521	Belanja Tunjangan Tenaga Pendidik Non PNS	267,784,800	0
3.0	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	359,536,300	0
3.0	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	2,222	0
3.0	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	25,029,450	0
3.0	511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	6,265,142	0
3.0	511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	38,255,000	0
3.0	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	21,363,900	0
3.0	511628	Belanja Uang Makan PPPK	58,550,000	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	1,153,099
JUMLAH			294,925,962,489	294,925,962,489

Keterangan :

FINAL

Bogor, 7 Mei 2025

Penanggung Jawab UAKPA

Rektor

Arif Satria

197109171997021003